

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pajak adalah salah satu komponen pendapatan negara yang besar di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hampir 70% APBN di indonesia pajak menjadi tumpuan untuk pembangunan dan belanja negara (www.serambinews.com). Pajak dihasilkan dari kontribusi masyarakat (wajib pajak) dengan menggunakan *self assesment*. Sistem *self assesment* adalah sistem dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan kewajiban perpajakan terutang, sedangkan peran petugas hanya mengawasinya. Berhasil atau tidak sistem ini ditentukan oleh wajib pajak itu sendiri dengan dibantu pengawasan yang optimal oleh aparat pajak (Agustiningsih, 2016).

Adanya *self assesment* sistem seharusnya wajib pajak dituntut untuk memiliki pemahaman yang memadai mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Setiani (2015) memiliki pemahaman yang memadai adalah indikator utama sebagai dasar untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Seorang wajib pajak yang memahami peraturan perpajakan yang berlaku mereka akan sadar akan pentingnya membayar pajak. Wajib pajak yang sadar akan pentingnya membayar pajak akan tergerak untuk membayar pajak dengan sukarela.

Penerimaan pajak per 31 desember 2016 mencapai Rp. 1.105 triliun, atau hanya 81% dari target penerimaan pajak sebesar Rp. 1.355 triliun, jumlah penerimaan itu sudah meliputi hasil *tax amnesty*. Diindikasikan bahwa

pemahaman pajak oleh wajib pajak yang masih kurang menjadi salah satu penyebab belum tercapainya target penerimaan pajak yang ditargetkan (www.swaranews.co.id).

Direktorat Jendral Pajak (DJP) membuat salah satu pembaharuan pada administrasi pelaporan pajak yang lebih sederhana dengan *e-filing*. Sistem tersebut diatur dalam dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-48/PJ/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ./2009 Tentang Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan tanggal 30 Desember 2011. Yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER - 26/PJ/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2013.

Adanya sistem pelaporan pajak menggunakan *e-filing* dapat memudahkan wajib pajak dalam melakukan pelaporan. Wajib pajak dapat melaporkan SPTnya 24 selama 7 hari dengan demikian wajib pajak dapat melaporkan SPTnya walaupun pada hari libur. Sistem ini sungguh bermanfaat bagi wajib pajak yang tidak dapat melaporkan SPTnya dikarenakan kesibukan. *E-filing* ini dapat mengurangi biaya yang disebabkan oleh penggunaan kertas. Dimudahkannya sistem pelaporan seharusnya dapat menggerakkan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan sukarela (Agustiningsih, 2016). Faktanya pada Maret tahun 2017 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Barat banjir wajib pajak yang ingin menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak 2016. Mungkin masih banyak WP (wajib pajak) yang belum familiar dengan sistem

tersebut," kata Kepala KPP Sidoarjo Barat, Andi Wahyu Mulyadi (Metrotvnews.com).

Pada penelitian Rusmawati dan Wardani (2015), yang meneliti mengenai pengaruh pemahaman pajak, sanksi pajak, dan sensus pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi yang memiliki usaha. Hasil penelitian menunjukkan pemahaman pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak, Hasil penelitian Suherman dkk (2015), yang meneliti tentang penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pada kantor pelayanan pajak Pratama Kota Tasikmalaya. Hasil penelitian menunjukkan penerapan *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT tahunan pada KPP Pratama Kota Tasikmalaya.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustiningsih (2016), yang meneliti tentang pengaruh penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan *e-filing* dan pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adanya fenomena, ketidakkonsistenan dari beberapa hasil penelitian terdahulu dan belum adanya penelitian yang meneliti pemahaman tentang pajak dan sistem *e-filing* di KPP Pratama Sidoarjo Barat membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PEMAHAMAN TENTANG PAJAK DAN SISTEM E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK”**.

2. Rumusan Masalah

1. Apakah pemahaman tentang pajak berpengaruh terhadap kapatuhan wajib pajak di KPP Pratama Sidoarjo Barat ?
2. Apakah penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kapatuhan wajib pajak di KPP Pratama Sidoarjo Barat ?

3. Tujuan

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pemahaman tentang pajak terhadap kapatuhan wajib pajak di KPP Pratama Sidoarjo Barat.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kapatuhan wajib pajak di KPP Pratama Sidoarjo Barat.

4. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan ilmiah kepada penulis maupun pembaca mengenai pengaruh pemahaman tentang pajak dan penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pada penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mendatangkan manfaat bagi KPP Pratama Sidoarjo Barat sebagai bahan evaluasi ataupun pengambilan keputusan.